



International
Labour
Organization

Jakarta

The background of the cover is a blue-tinted photograph of a group of people, likely migrants, sitting on the floor with their luggage. The image is partially obscured by the title text and a decorative grid pattern in the bottom right corner.

10 *Tahun* Menangani Migrasi Kerja di Indonesia

Bersama Bisa

"Together it's possible"

10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia

Bersama Bisa "Together it's possible"

Apa itu ILO?

Didirikan pada tahun 1919, Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) bertanggungjawab untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong penciptaan pekerjaan layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog tentang masalah-masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan. ILO merupakan satu-satunya badan PBB yang mempertemukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam “dialog sosial tripartit” untuk bersama-sama menyusun kebijakan dan program tentang perburuhan dan ketenagakerjaan.

Serangkaian standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM) internasional yang luas telah dikembangkan selama lebih dari 50 tahun. Sebagian besar negara telah meratifikasi konvensi-konvensi pokok internasional; namun ketentuan dari konvensi-konvensi ini umumnya belum diterapkan kepada pekerja migran.



Mandat ILO harus mampu menjangkau mereka yang paling rentan, yang senantiasa menghadapi ketidakpastian dan yang tidak mendapatkan perlindungan sosial. Mereka kerap kali sulit dijangkau dan jumlah mereka terbilang sangat besar. Upaya yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga memperlihatkan apa yang bisa kita lakukan. ILO karenanya harus memberikan prioritas bagi [...] pekerja migran

Guy Ryder,
Direktur Jenderal ILO

1

Indonesia dan ILO

Indonesia dan ILO telah bekerja sama secara erat untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi semua sejak negara ini menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950.

Program Nasional untuk Pekerjaan Layak 2012-2015 saat ini difokuskan pada sejumlah bidang prioritas, yaitu penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial dan perlindungan sosial. Bidang-bidang ini mencerminkan konteks sosial ekonomi, prioritas nasional, mandat ILO serta prioritas para konstituen ILO saat ini. Di bawah pilar strategis perlindungan sosial, Kantor ILO Jakarta menyediakan nasihat teknis dan dukungan lain untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

© ILO Jakarta



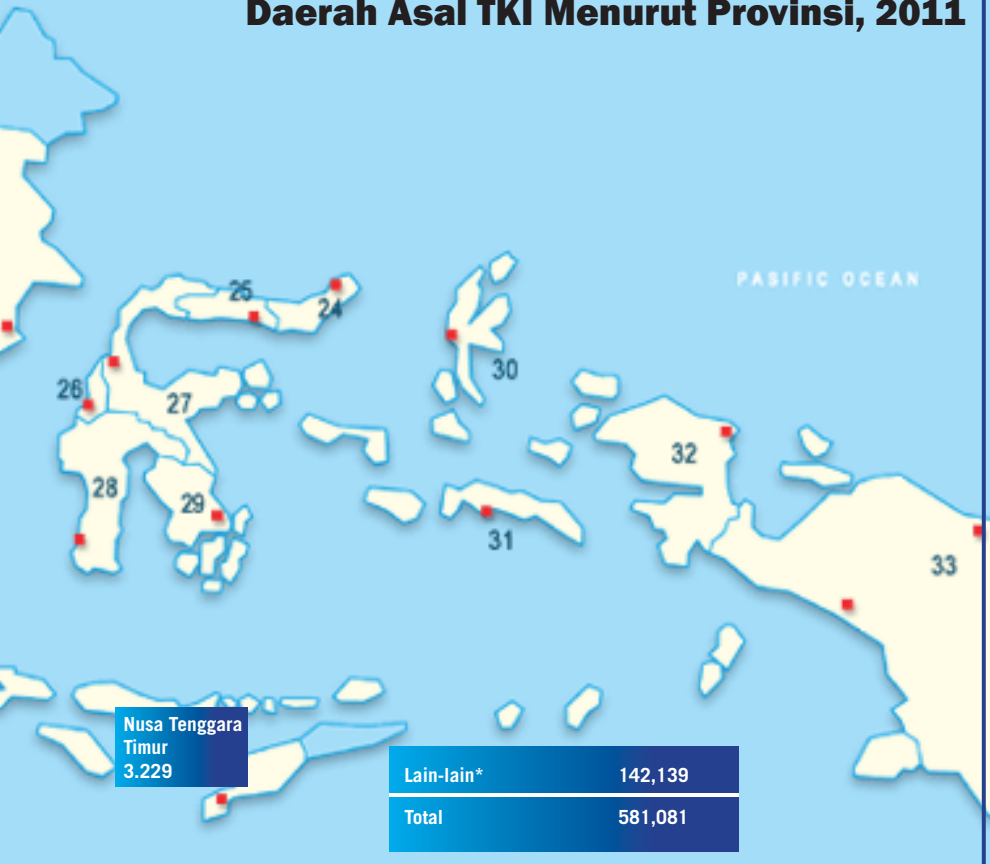
Pekerja rumah tangga migran mengikuti pelatihan sebelum keberangkatan.

Selama lebih dari dua dekade terakhir, Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan jumlah pekerja migran yang besar. Setiap tahun, banyak penduduk Indonesia yang memilih untuk mencari pekerjaan sementara di luar negeri; di mana lebih dari 580.000 orang meninggalkan Indonesia pada tahun 2011, dan jumlah ini kemungkinan besar meningkat pada beberapa tahun mendatang. Selama periode 2006-2012, jumlah pekerja migran mencapai sekitar 4 juta (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI, 2012). Sedangkan jumlah pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi diperkirakan dua hingga empat kali lipat lebih besar.



Negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia umumnya adalah negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah, di mana Malaysia dan Arab Saudi merupakan dua negara tujuan utama. **Remitan dari para pekerja migran pada tahun 2012 diperkirakan sebesar USD 7 milyar (Bank Indonesia dan BNP2TKI, 2012), yang menjadikan mereka kontributor terbesar kedua bagi pendapatan devisa Indonesia dan karenanya menjadi mereka faktor yang signifikan dalam perekonomian dan masyarakat Indonesia.** Pekerja migran merupakan bagian yang penting dalam ketenagakerjaan Indonesia. Migrasi kerja menawarkan prospek pekerjaan bagi banyak orang yang memiliki peluang kecil mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri sehingga membantu mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran di Indonesia.

Daerah Asal TKI Menurut Provinsi, 2011



Sumber: Diadaptasi dari BNP2TKI, 2012.

* Data BNP2TKI hanya disediakan di tingkat kabupaten (yaitu daerah-daerah dengan jumlah TKI terbanyak) dan tidak dipisahkan menurut provinsi. Oleh karena itu, 'Lain-lain' termasuk jumlah TKI dari semua kabupaten/provinsi dengan kombinasi jumlah TKI yang lebih kecil.

10 Negara Tujuan Utama TKI, 2011

No	Negara tujuan	2011
1.	Saudi Arabia	137.643
2.	Malaysia	134.108
3.	Taiwan	73.498
4.	Hong Kong	50.283
5.	Singapura	47.781
6.	Uni Emirat Arab (UEA)	39.857
7.	Qatar	16.578
8.	Amerika Serikat	13.746
9.	Korea Selatan	11.390
10.	Brunei Darussalam	10.805

Sumber: BNP2TKI, 2012

Sebagian besar TKI melakukan pekerjaan yang membutuhkan sedikit keterampilan. Sekitar 76 persen (BNP2TKI, 2012) TKI adalah perempuan; di mana 90 persen di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). PRT asal Indonesia didominasi oleh para perempuan desa yang tidak memiliki keterampilan dengan latar belakang pendidikan rendah, yang hanya memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas. PRT migran juga memiliki presentase yang besar dalam perpindahan internal, di mana PRT pindah dari desa ke kota-kota besar di semua provinsi di Indonesia.

Fakta tentang migrasi kerja internasional

- Terdapat sekitar 105 juta pekerja migran yang tinggal di luar negara asal mereka, dengan tingkat pertumbuhan persentase perempuan yang besar (hingga 50 persen).
- Diperkirakan sekitar 30 juta (atau sekitar 30 persen) pekerja migran di Asia (2010).
- Jumlah perempuan di kalangan pekerja migran dari Asia terus meningkat, dan diperkirakan mencapai antara 60 dan 80 persen.
- Sekitar 53 juta pekerja migran bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di seluruh dunia pada 2010; setengah dari jumlah keseluruhan PRT ini berada di Asia.
- Pekerjaan rumah tangga masih menjadi sektor yang sangat didominasi perempuan: Kaum perempuan mencapai 83 persen dari jumlah keseluruhan PRT.
- Pekerjaan rumah tangga menjadi salah satu sumber lapangan kerja terpenting bagi kaum perempuan Asia yang pergi melewati batas negara mereka.



Pekerjaan PRT biasanya tidak dianggap sebagai pekerjaan “nyata”. Tapi dianggap sebagai pekerjaan informal, berdasarkan hubungan kerja kekeluargaan dan paternalistik yang diatur melalui rasa saling percaya, dan tidak termasuk dalam cakupan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang ada. Sebagian besar PRT bekerja dan tinggal bersama keluarga majikan mereka, sehingga mereka menjadi “kasat mata” dan sangat rentan terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan. Bukti yang diperoleh dari gugatan hukum, wawancara dengan PRT serta beberapa survei menegaskan adanya kasus kekerasan mental, fisik dan seksual, serta bentuk-bentuk eksploitasi termasuk perdagangan, terpaksa bekerja akibat lilitan hutang (ijon) dan kerja paksa.

Kesaksian Ida, mantan tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Arab Saudi

“Pertama kali saya pergi ke luar negeri pada tahun 1993. Saya menganggapnya sebagai peluang untuk keluar dari pengangguran, menghasilkan uang dan membantu perekonomian keluarga saya. Saya tidak punya KTP waktu itu karena umur saya masih 15 tahun. Agen penyalur tenaga kerja di Jakarta mengubah umur saya menjadi 32 tahun dan membantu saya mengurus KTP dan paspor.

Pengalaman pertama saya sebagai TKW di Medinah, Arab Saudi, berjalan baik. Saya bekerja selama sembilan tahun, dan setiap tiga tahun, saya diberi cuti selama satu bulan, di mana saya bisa pulang kampung. Pada tahun 2002, saya pergi lagi ke Arab Saudi tapi melalui agen lain. Saya ditempatkan di Mekah. Saya bekerja sendiri selama hampir 24 jam setiap harinya tanpa istirahat. Dan saya tidak diberi libur.

Dua bulan bekerja, siksaan, pelecehan dan tindak kekerasan mulai terjadi. Saya dipukuli, diseterika disiram air panas, distrum, ditendang dan dilecehkan secara verbal. Saya tidak diberi makanan, atau diberi kesempatan berkomunikasi dengan orang lain. Alasan majikan saya melakukan itu semua adalah karena saya tidak mampu melaksanakan pekerjaan di dapur dengan baik.

Karena sudah tidak tahan lagi menerima segala siksaan tersebut, saya memutuskan lari dengan memanjat jendela di ruang tamu. Namun saya terjatuh dari jendela apartemen empat lantai tersebut, sehingga tidak sadarkan diri dengan tulang punggung patah. Saya kembali ke Indonesia pada bulan Oktober 2003, dengan tangan kosong, luka-luka yang belum sembuh, pincang dan mata kanan yang hampir buta. Tapi saya masih ingin pergi keluar negeri lagi, agar saya bisa membantu perekonomian keluarga saya.” ❁

Selama 10 tahun, ILO, beserta pada mitranya dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, telah berupaya memerangi diskriminasi dan eksploitasi terhadap TKI, terutama PRT, baik di Indonesia maupun di negara-negara tujuan.

ILO telah berupaya mempromosikan pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan terhadap Pekerja Migran (Tahap I)

Dalam semua tahapan Proyek, walaupun ditekankan pada upaya untuk perlindungan PRT, namun Proyek ini ditargetkan untuk SEMUA sektor pekerja migran yang rentan. Lokasi Proyek adalah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Hong Kong (SAR)

Donor:



2004-2006

2006-2008

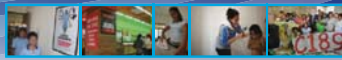
Menggalang Aksi untuk Perlindungan Pekerja Migran dari Kerja Paksa dan Perdagangan di Asia Tenggara

Difokuskan secara khusus pada pekerja rumah tangga migran.. Lokasi Proyek adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong (SAR), dan Filipina

Donor:



(UK-DFID)



departemen pemerintah, serikat pekerja, organisasi pekerja migran dan PRT serta organisasi masyarakat madani di Indonesia maupun di negara-negara tujuan.

Berbagai kegiatan, yang dilaksanakan melalui berbagai proyek, telah dilakukan ILO untuk membantu upaya pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja migran serta memerangi kerja paksa dan perdagangan.



Memerangi Kerja Paksa dan
Perdagangan terhadap Pekerja
Migran (Tahap III)

Donor:



2008-2010

2010-2012

2012-2016

Memerangi Kerja Paksa
dan Perdagangan terhadap
Pekerja Migran (Tahap II)

Donor:



Aksi Tripartite untuk Melindungi dan
Mempromosikan Hak Pekerja Migran
di Kawasan ASEAN (ASEAN Triangle
Project)

Proyek ini ditargetkan pada SEMUA pekerja
migran yang rentan, termasuk PRT, dengan
fokus wilayah geografis di kawasan Asia
Tenggara

Donor:



Canadian International
Development Agency





2

Apa yang telah dicapai?

Untuk memperkuat perlindungan terhadap TKI, ILO telah membantu para mitra nasional dan lokal dalam mencapai tujuan-tujuan berikut ini:

Capaian penting 1:

Komitmen politik dan perubahan kebijakan

Adanya kesenjangan dalam peraturan perundangan dan kebijakan hukum terkait perlindungan pekerja migran di negara asal maupun negara tujuan mengakibatkan penempatan tenaga kerja yang eksploitatif dan perlindungan yang kurang memadai. ILO telah menyediakan bantuan bagi para mitra dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengkaji dan merevisi kebijakan dan kerangka hukum yang ada serta mengembangkan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan dan imigrasi.

Di Indonesia, **Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Pekerja dan Kondisi Kerja PRT** sudah disusun sejak tahun 2004, dengan bantuan teknis dari ILO. Ada lima upaya gagal untuk memasukkan RUU ini ke dalam agenda parlemen. Namun, pada tahun 2010, RUU ini akhirnya menjadi prioritas dalam program legislasi nasional di DPR dan sudah dijadwalkan untuk diperdebatkan di parlemen. Wacana kebijakan nasional menghangat selama 2010-2011 dan dukungan untuk mengkaji RUU ini tetap menjadi prioritas legislatif di parlemen.

Di tingkat ASEAN, partisipasi Indonesia dalam penyusunan dan finalisasi **Deklarasi ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran** tahun 2007 – yang merupakan instrumen pengikat untuk perlindungan pekerja migran – memperlihatkan adanya komitmen pemerintah terhadap persoalan ini di tingkat regional. Sejak Deklarasi ini ditetapkan, para menteri tenaga kerja ASEAN telah melembagakan rapat tahunan yang disebut Forum ASEAN tentang Pekerja Migran. Forum ke-4 telah diselenggarakan pada tahun 2011 di Bali, Indonesia. Forum

ini menyediakan sarana terbuka untuk diskusi dan bertukar pendapat serta ide di kalangan pemangku kepentingan terkait di negara-negara anggota ASEAN tentang masalah migrasi kerja.

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia yang baru terpilih mengakui bahwa masih ada ruang untuk melakukan perbaikan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk itu, ILO telah mendukung pemerintah memastikan bahwa masalah pekerja migran tetap dijadikan prioritas dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 serta Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)**. Pemerintah telah berupaya memperkuat kerangka kebijakan tentang penempatan dan perlindungan TKI, termasuk melalui amandemen **UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri**.

ILO menyediakan masukan teknis dan mendukung berbagai kampanye publik serta berbagai rapat pemangku kepentingan yang menghasilkan persetujuan Presiden untuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004. Persetujuan ini menandakan awal dari diskusi parlemen secara resmi tentang usulan revisi UU antara pemerintah dengan parlemen, di mana organisasi-organisasi pemangku kepentingan terkait diundang untuk memberikan kontribusi mereka (Mandat Presiden untuk merevisi UU No. 39/2004 ditandatangani pada 8 Agustus 2012). Revisi UU ini kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional untuk tahun 2012.

Komitmen ILO penting untuk mendorong Pemerintah Indonesia mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan rencana yang mendukung pekerja migran. Sejak awal kegiatan ILO Jakarta terkait masalah migrasi pekerja, ILO telah mendukung dan mendorong pemerintah untuk meratifikasi **Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (1990)** melalui berbagai kampanye dan rapat pemangku kepentingan, yang berujung pada ratifikasi yang dilakukan pemerintah pada bulan Mei 2012.

ILO telah mendukung perdebatan di tingkat nasional dan regional serta artikulasi sikap terhadap penetapan standar internasional tentang PRT (2009-2011), yang diadopsi pada sidang ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2011 sebagai **Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi ILO No. 201 tentang Pekerjaan Layak untuk PRT**. Kegiatan ini menghasilkan keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerima salah satu rekomendasi dalam Kajian Periodik Universal PBB tahun 2012 untuk meratifikasi ILO Konvensi No. 189.

Di akhir tahun 2011, **Kampanye Global untuk Ratifikasi Nasional dari Konvensi ILO No. 189** diluncurkan International Trade Union Confederation (ITUC). Kampanye ini berupaya untuk menghasilkan ratifikasi Konvensi tersebut, pembentukan organisasi-organisasi PRT serta mengembangkan organisasi PRT. Kampanye ini memilih Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara di Asia untuk melakukan aksi prioritas. Kini di Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), bekerja sama dengan organisasi-organisasi pekerja migran dan PRT serta organisasi masyarakat madani lainnya, tengah melaksanakan kampanye nasional untuk mempromosikan hak-hak PRT.

Sebagai badan PBB yang memiliki spesialisasi di bidang ketenagakerjaan, ILO memiliki pengalaman luas dalam menetapkan standar-standar internasional dan mempromosikan pekerjaan layak dan kondisi kerja yang adil untuk semua. Selama bertahun-tahun, ILO di Indonesia telah menjalin kerjasama erat dengan para mitranya dalam meningkatkan kondisi TKI sesuai standar internasional.

© ILO



100th Session of the International Labour Conference *Building a future with decent work*



© ILO

Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Indonesia pertama yang memberikan kata sambutan dalam rapat tahunan ILO, Konferensi Perburuhan Internasional.

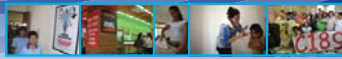
© ILO



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berpidato dalam sidang ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa, 14 Juni 2011

Mereka [pekerja migran] merupakan aktor penting dalam era baru keadilan sosial. Kita tidak dapat mengabaikan kontribusi mereka terhadap pasar tenaga kerja global, dan terhadap perekonomian di negara asal mereka. Kami di Indonesia menyebut pekerja migran ini sebagai 'pahlawan devisa', atas kerja keras dan pengabdian tanpa pamrih mereka terhadap kesejahteraan keluarga mereka di kampung halaman

**Susilo Bambang Yudhoyono,
Presiden**



Selama 10 tahun menangani persoalan migrasi kerja di Indonesia dan negara-negara tujuan, ILO dan para mitranya telah membantu meningkatkan komitmen politik dan perubahan kebijakan terkait persoalan ini di Indonesia. Sepuluh tahun lalu, UU ketenagakerjaan Indonesia tidak mencakup pekerja migrant. Namun, perkembangan kebijakan saat ini mencerminkan kepentingan nasional dalam memperkuat sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran. Standar-standar ketenagakerjaan internasional tentang pekerja migran telah dikembangkan, dengan meningkatkan keterkaitan antara standar internasional dan kebijakan nasional dengan peraturan dan kebijakan daerah. Advokasi kegiatan dan bantuan teknis telah disediakan oleh para pemangku kepentingan utama di negara asal dan negara tujuan, dan ILO telah bekerja sama dengan para mitra kelembagaan dalam memperkuat kerangka hukum tentang perlindungan pekerja migran, termasuk PRT, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kegiatan ILO terkait migrasi kerja di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi hak-hak pekerja, HAM, masalah gender dan kesehatan dalam menyusun kebijakan nasional tentang pekerja migran menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat migrasi kerja, baik dari perspektif perekonomian nasional maupun pekerja migran itu sendiri.

Capaian penting 2:

Advokasi dan peningkatan kesadaran

Kurangnya kesadaran di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat umum tentang nasib pekerja migran menghambat advokasi masyarakat sipil, kampanye dan lobi atas nama pekerja migran dan keluarga mereka, sehingga mempersulit perubahan yang akan dilakukan.

Sebagai bagian dari upaya ILO menyediakan perlindungan dan pengakuan yang lebih baik terhadap pekerja migran, **ILO mengadakan sejumlah kampanye berbasis media secara luas untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat luas**. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kondisi kerja para migran, terutama PRT, pekerja di Indonesia dan perlunya perlindungan ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, upah, hari libur, jam kerja, perlindungan sosial, kondisi hidup dan sebagainya. Melalui kampanye-kampanye ini, ILO berupaya memberikan penyuluhan secara luas, pemahaman serta penerimaan atas hak-hak PRT sebagai pekerja.

Di samping itu, ILO, bekerja sama dengan jaringan siaran radio dan televisi nasional serta internasional, telah mengadakan serangkaian kampanye radio dan kegiatan media melalui acara bincang-bincang interaktif dan siaran langsung tentang hak



dan kondisi kerja pekerja migran. Radio merupakan sarana yang paling hemat biaya dalam menjangkau kelompok masyarakat luas dan memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik dibandingkan TV atau media cetak.

Untuk mempromosikan hak-hak PRT sebagai pekerja, ILO telah memublikasikan materi komunikasi seperti poster, brosur dan sarana informasi tentang penyuluhan melalui para mitra sosial dan pemangku kepentingan lain (lihat di bawah ini). Di samping itu, selain film-film lainnya mengenai pekerja migran, enam film dokumenter singkat tentang PRT, yang bertujuan untuk mengangkat situasi pekerja, telah diproduksi. Materi-materi ini tersedia di kantor ILO Jakarta dan dapat diakses secara maya melalui situs ILO Jakarta.

Kegiatan peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas telah membantu memasukkan masalah gender ke dalam peraturan perundangan dan program terkait perlindungan pekerja migran. Pemberdayaan gender telah memperkuat kemampuan pekerja migran perempuan, terutama PRT.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah merupakan hal yang sangat penting mengingat mereka adalah motor utama untuk melakukan perubahan. Selama 10 tahun menangani masalah migrasi kerja di Indonesia dan negara-negara tujuan, sejumlah praktik terbaik telah diidentifikasi dan ILO telah menunjukkan bahwa metodologinya mampu meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan terkait untuk membantu menciptakan dialog dan mekanisme yang sesuai.



Peningkatan kesadaran masyarakat berbasis media – Duta Pekerja Migran

Pada tahun 2006, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), bekerja sama dengan ILO, mengangkat penyanyi Franki Sahilatua (meninggal pada tahun 2011) dan Nini Carlina sebagai Duta Pekerja Migran untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengadakan kampanye advokasi. Pada tahun 2008, artis dan politisi Rieke Dyah Pitaloka juga diangkat sebagai Duta. Para Duta ini dipilih atas keinginan para pekerja migran, yang menganggap karya dan musik para Duta ini mewakili kepentingan mereka. Mereka diangkat untuk mewakili TKI karena keterlibatan dan partisipasi mereka dalam membela dan melindungi hak dan kepentingan pekerja, terutama pekerja migran.

Para seniman ini dikenal akan kepedulian mereka atas hak-hak pekerja migran di Indonesia dan luar negeri dan telah berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat sejak tahun 2006 melalui berbagai kegiatan berikut ini:

- **Mengadakan kampanye publik di tingkat lokal tentang perlindungan pekerja migran** di daerah-daerah asal TKI, seperti provinsi Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka berbicara dengan komunitas pekerja migran, mendidik mereka tentang migrasi yang aman, hak-hak mendasar pekerja serta HAM, dan bagaimana memperoleh bantuan pemerintah Indonesia dan organisasi terkait saat di luar negeri. Di samping itu, mereka mengadakan kegiatan advokasi dengan otoritas setempat, termasuk DPRD dan kantor-kantor dinas pemerintah, tentang persoalan yang terkait dengan hak dan perlindungan pekerja migran;
- **Mewakili TKI untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait perlindungan pekerja migran** dari tahap rekrutmen hingga kepulangan mereka, serta memastikan pelaksanaan standar-standar yang layak untuk pekerja migran dalam hal upah, kontrak kerja, perlindungan dan lain-lain;



© ILO Jakarta

- Bertindak selaku perwakilan dari aspirasi TKI di luar negeri melalui konser-konser musik di Hongkong dan negara-negara tujuan lainnya;
- Berpartisipasi dalam berbagai kampanye media tentang pekerja migran sebagai pembicara maupun narasumber terkait masalah migrasi pekerja, termasuk ikut menyusun informasi layanan masyarakat tentang hak dan perlindungan pekerja migran; dan
- Berpartisipasi dalam acara peringatan hari Migran Internasional yang jatuh setiap tanggal 18 Desember.

Para Duta Pekerja Migran melakukan berbagai kegiatan di seluruh negeri.

Capaian penting 3: Peningkatan kapasitas untuk sistem migrasi pekerja yang lebih baik

Upaya ILO di Indonesia untuk mengembangkan sistem migrasi kerja yang lebih baik mencakup serangkaian inisiatif peningkatan kapasitas bagi para mitra utama dalam memperkuat kapasitas organisasi mereka.

Peningkatan kapasitas untuk Pemerintah Indonesia

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap perlunya melindungi dan membantu TKI. Pada tahun 2006, Pemerintah meluncurkan serangkaian inisiatif kebijakan dan tindakan administratif untuk memperkuat perlindungan TKI. Salah satu inisiatif kebijakan ini adalah **Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006**, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan TKI selama proses migrasi mereka, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan Instruksi Presiden ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memainkan peran penting untuk melindungi warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Untuk memastikan bahwa perlindungan TKI di luar negeri menjadi prioritas yang tinggi, **Kemenlu telah bekerja sama secara terus-menerus dengan ILO sejak tahun 2006 untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Kemenlu dan Atase dari kementerian lain, yang ditugaskan di luar negeri melalui pelatihan.**

Di samping itu, **Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006** membentuk **Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)** yang terdiri dari pegawai dari berbagai kementerian dengan mandat masing-masing di sektor pekerja migran. Lembaga ini memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinir dan terpadu. BNP2TKI ditugaskan untuk melayani, mengkoordinir dan memantau proses migrasi internasional. Sejak pembentukannya, ILO telah membantu membangun dan meningkatkan kapasitas lembaga ini dengan menyediakan bantuan bagi program-program pelatihan untuk para pegawai BNP2TKI.

Di samping itu, ILO telah membantu salah satu mitra utamanya, yaitu Kemenakertrans dalam meningkatkan kapasitas pegawai mereka terkait dukungan mata pencaharian

bagi pekerja migran. Upaya ini mencakup bantuan untuk mengembangkan Balai-balai Pelatihan di bawah naungan Kemenakertrans. Melalui kegiatan ini, ILO telah membantu rencana Pemerintah Indonesia untuk meluncurkan pelatihan kewirausahaan bermutu tinggi agar masyarakat setempat dapat memberdayakan diri secara ekonomi dan menekan tingginya tingkat migrasi ke luar negeri.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini menghasilkan pelembagaan kegiatan dan praktik perlindungan TKI. Sejumlah metodologi ILO telah diadopsi dan diintegrasikan oleh Pemerintah Indonesia ke dalam perencanaan mereka. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kemenlu, misalnya, telah memasukkan modul pelatihan ILO mengenai “Pelatihan tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri: Melindungi HAM” ke dalam Kursus Diplomatik Junior, Kursus Diplomatik Pertengahan Karir dan Kursus Diplomatik Senior mereka.

Kemenlu juga telah mengembangkan Pusat Layanan Warga (Citizen Service Centers), yang dioperasikan oleh kedutaan-kedutaan Indonesia di beberapa negara tujuan utama TKI. Pusat-pusat layanan ini menyediakan tempat tinggal sementara, fasilitas dan perlindungan bagi TKI yang menghadapi masalah di negara-negara tujuan dan yang memilih untuk meninggalkan rumah majikan mereka. Pusat-pusat ini juga menyediakan program-program pelatihan keterampilan kerja, pelatihan bahasa dan kursus komputer serta bantuan hukum.

© ILO Jakarta



Pelatihan bersama ILO/Kemenlu untuk membangun kapasitas staf layanan luar negeri dan atase terkait permasalahan pekerja migran.

© ILO Jakarta

Cerita sukses - program pengembangan kewirausahaan ILO, Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (SIYB)

Di Indonesia, di mana presentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perekonomian informal terbilang tinggi, pengembangan kewirausahaan dan keterampilan mata pencaharian, dikombinasikan dengan fasilitas keuangan mikro, merupakan sebuah respons berkesinambungan terhadap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran serta stagnannya pembangunan ekonomi di daerah pedesaan.

Di akhir tahun 2010, Kemenakertrans mengadopsi dan melembagakan program pengembangan kewirausahaan yang disusun ILO dan telah diuji secara internasional, yaitu Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (SIYB), sebagai modul yang telah disetujui untuk program pelatihan kewirausahaan. Ini merupakan kemajuan penting dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah setengah pengangguran dan pengangguran secara efektif, dan mewujudkan target kebijakan untuk mendorong pengembangan usaha dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Herry Subiyakto, Kepala Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (BBPPK), Kemenakertrans, mengatakan bahwa Kemenakertrans telah menggabungkan SIYB ILO dengan pelatihan pengembangan keterampilan mata pencaharian Kemenakertrans. "SIYB telah terbukti sebagai cara yang efektif dan mudah untuk memahami pengembangan usaha oleh calon pengusaha dan mereka yang ingin memperluas usaha mikro mereka. Kami telah menggabungkan modul ini dengan keahlian kami sendiri di bidang pelatihan pengembangan keterampilan mata pencaharian, seperti kelautan dan proses pertanian, agar memberi dampak yang lebih kuat di tingkat masyarakat" 🌟

Cerita sukses – Meniti Sukses dari Nol – Kisah Yayuk

Pada awalnya tidak banyak yang mengira Endang Sri Wahyuni, 43 tahun, dari PPSW Pasoendan—LSM yang menangani masalah pemberdayaan perempuan—akan dinominasikan sebagai salah satu pelatih terbaik dalam program Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (Start and Improve Your Business/SIYB) ILO. Betapa tidak, perempuan yang akrab disapa Yayuk itu, sangat pendiam bahkan enggan mengucapkan sepatah kata pun selama pelatihan pertama yang diikutinya pada 2007. Namun kini dia sangat ekspresif dan komunikatif.

Untuk membantu Yayuk meningkatkan rasa percaya dirinya, fasilitator kemudian memberi kesempatan kepadanya untuk mengamati sesi-sesi pelatihan lain dan

mengadakan sesi langsung (one-on-one session) pada latihan praktik. Setelah diskusi ini, Yayuk mulai berubah. Ia mampu melaksanakan tugasnya secara memuaskan saat dipilih untuk memfasilitasi beberapa kelas. Dia bahkan dinominasikan sebagai pelatih terbaik karena caranya yang interaktif dan partisipatif dalam menyampaikan materi pelatihan. Yayuk terus melangkah maju. Hingga saat ini, Yayuk telah mengadakan lima pelatihan kewirausahaan (ToE) secara mandiri tanpa bantuan keuangan dari ILO. Ia juga telah berhasil mengembangkan program SIYB dan menerima sponsor dari Pemerintah Daerah (Pemda) Sukabumi, Pemda Jawa Barat serta lembaga donor internasional seperti Ford Foundation. Yayuk pun berpartisipasi dalam program

Pelatihan untuk Pelatih Utama, yang diadakan ILO Jakarta, 2010 lalu. Kini dia sedang menunggu sertifikasi pelatih utama dan diangkat sebagai pelatih untuk pelatihan SIYB. Tak hanya itu. Yayuk juga membuka usaha sendiri. Pada 2009, ia mewujudkan ide bisnis selama pelatihan menjadi sebuah kenyataan, yakni membuka "Pondok Mie Batok", sebuah warung mi di Sukabumi, Jawa Barat. Melalui usahanya ini, ia memperoleh penghasilan sebesar Rp 30-40 juta per bulan sehingga mampu mempekerjakan tujuh orang pekerja. Pkerjanya adalah mantan pekerja migran atau istri pekerja migran. Ia juga telah membuka satu cabang di Bekasi.

© ILO Jakarta



Endang Sri Wahyuni bersama dengan staf ILO, Irham Saifuddin, di salah satu pusat pelatihan

"SIYB mudah diterapkan, sangat sederhana dan inspiratif. Walaupun Anda tidak punya pengalaman bisnis sama sekali, SIYB dapat membantu mewujudkan cita-cita Anda. Saya adalah buktinya, dan saya tidak pernah membayangkan saya bisa menjadi seorang pengusaha, apalagi konsultan bisnis,"

Belum lama ini Yayuk diangkat sebagai direktur PPSW Pasoendan. Yang sangat menarik, program pertama ia lakukan adalah membentuk sebuah divisi khusus sebagai Layanan Jasa Pengembangan Usaha (BDSP). "Dengan membentuk BDSP, kami dapat meningkatkan layanan hingga menjangkau masyarakat marginal. Kami juga berkesempatan menjual layanan kewirausahaan secara komersial ke badan-badan usaha yang ada. Hal ini tentunya memberi penghasilan untuk organisasi," kata Yayuk. ✨

Peningkatan kapasitas pekerja migran dan keluarga mereka

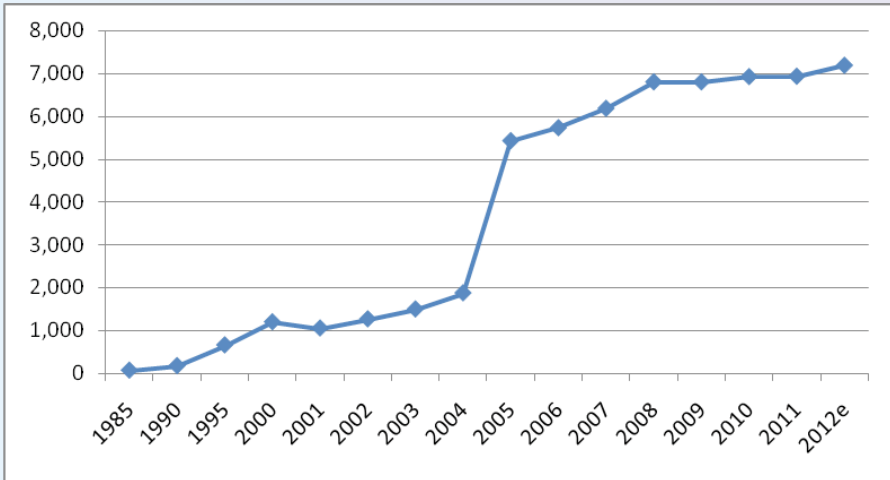
Latar belakang sosial ekonomi sebagian besar TKI, khususnya kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, membuat mereka tidak mengetahui risiko migrasi dan lebih rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi. ILO telah mengembangkan dan melaksanakan pelatihan bagi para pelatih dan versi langkah demi langkah untuk memfasilitasi penyuluhan, bantuan, reintegrasi dan layanan pemberdayaan ekonomi bagi TKI agar dapat mengembangkan keterampilannya.

Selama beberapa tahun belakangan ini, akses ke layanan keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia telah meningkat sebagai hasil dari proliferasi produk-produk pinjaman mikro yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan mikro.

TKI dan keluarga mereka perlu memiliki pemahaman yang baik tentang implikasi migrasi secara finansial, termasuk potensi penghasilan, biaya dan pemotongan karena penempatan dan pekerjaan mereka di luar negeri, serta bahaya dan kondisi yang dapat mempengaruhi hasil dari proses migrasi tersebut. Oleh karena itu, pendidikan keuangan memainkan peran penting yang memungkinkan TKI dan keluarga mereka mengelola, menabung dan menginvestasikan penghasilan dari remitan yang dikirimkan pada TKI kepada keluarga mereka secara teratur selama bekerja di luar negeri.

ILO telah mengembangkan sejumlah modul pelatihan tentang pendidikan keuangan bagi TKI dan keluarga mereka agar dapat mengelola secara baik penghasilan mereka, terutama remitan. Modul-modul ini mencakup pelatihan tentang pengambilan keputusan yang tidak bias gender dalam keluarga dan implikasinya terkait pemakaian uang. Pendidikan keuangan serta kegiatan mata pencaharian dan kewirausahaan yang didukung ILO telah menerima penghargaan dari lembaga pemerintah nasional dan daerah serta pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya. Pekerja migran sangat perlu dibekali dengan pengetahuan tentang layanan keuangan termasuk asuransi, layanan bank, termasuk saluran remitan yang aman sehingga memungkinkan mereka menggunakan remitan secara lebih produktif. Aliran masuk remitan dari TKI meningkat selama beberapa tahun belakangan ini, sehingga menjadi sumber utama devisa Indonesia.

Aliran Masuk Remitan dari TKI (dalam US\$ juta), 1985-2012



Sumber: World Bank 2012

Jawa Barat merupakan daerah asal TKI terbesar kedua. Oleh karena itu, pendidikan keuangan merupakan bidang yang penting untuk ditingkatkan bagi masyarakat migran, termasuk perlindungan mereka, yang diintegrasikan ke dalam pelatihan pendidikan keuangan.

**Hening Widiatmoko,
 Kepala Disnakertrans Jawa Barat**

Peningkatan kapasitas masyarakat dan organisasi pekerja migran

Pendekatan holistik ILO yang menghubungkan mekanisme bantuan migran, baik di dalam maupun luar negeri, dengan upaya pemberdayaan ekonomi di daerah asal akan membantu membudidayakan berbagai jenis alternatif untuk mengatasi masalah TKI, mengakui akar masalah migrasi kerja dan untuk membantu memperkuat daya tahan masyarakat terhadap kemiskinan dan ketidakberdayaan secara ekonomi.

ILO mengakui peran koperasi di daerah asal TKI dalam mempromosikan pemakaian remitan secara produktif,

dikarenakan sebagian besar anggota koperasi dikelola mantan TKI dengan latar belakang dan pengalaman yang sama.

Sebagian besar koperasi migran masih memiliki sistem administrasi

dan pengoperasian manajemen yang sederhana. Karenanya, ILO mendukung pengembangan koperasi masyarakat migran di beberapa kabupaten di Jawa Timur. ILO membantu peningkatan kapasitas lembaga-lembaga nasional dan lokal agar mereka dapat mengembangkan program-program pemberdayaan keuangan terpadu bagi TKI dan keluarga mereka, yang didanai oleh anggaran program reguler mereka. Tujuan dari kegiatan adalah mendukung kegiatan organisasi TKI mendorong kegiatan mereka, memobilisasi anggota dan memperkuat suara dan keterwakilan mereka di tingkat nasional dan lokal.

© ILO Jakarta



Pekerja migran di Hongkong.

Cerita sukses ILO di Indonesia Waniti: Dari TKW menjadi ketua koperasi

ILO mengadakan beberapa lokakarya pelatihan untuk meningkatkan pengelolaan dan administrasi koperasi dan memfasilitasi interaksi langsung antara koperasi migran, penyedia keuangan dan dinas pemerintah terkait. Melalui kegiatan-kegiatan ini, koperasi mengembangkan sarana untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas, menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, swadaya dan meningkatkan solidaritas.

Salah satu peserta pelatihan adalah Waniti, mantan TKW yang pernah bekerja di Hongkong, yang mendirikan dan kini mengetuai koperasi Citra Bumi Mandiri di Malang yang secara khusus dirancang dan ditargetkan bagi para pekerja migran dan keluarga mereka. Koperasi ini secara resmi terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten Malang pada tahun 2008. Anggotanya telah menerima manfaat dari pemakaian remitan secara produktif, kredit untuk kesehatan dan pendidikan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan

© ILO Jakarta



Waniti, ketua dari koperasi migran yang berhasil.

"Saya ingin membuktikan bahwa koperasi migran jugapunya kekuatan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Kami juga memperoleh banyak keuntungan dari kerjasama kami dengan proyek ILO. Kini jumlah anggota kami meningkat, dengan administrasi yang lebih baik, dan banyak dari anggota kami yang bekerja di luar negeri menginvestasikan remitan mereka di koperasi kami," kata Waniti.

Keyakinan Waniti juga telah membuktikan bahwa perempuan dapat memainkan peran penting dalam kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka maupun masyarakat mereka. Dikarenakan dedikasi dan kerja kerasnya, Waniti dipilih oleh Kemenakertrans pada bulan Februari 2010 untuk menerima penghargaan atas upaya luar biasanya dalam mempromosikan pemakaian remitan secara produktif dan dalam mempromosikan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat migran. ✿

Selama 10 tahun menangani persoalan migrasi kerja di Indonesia dan negara-negara tujuan, ILO telah mengidentifikasi sejumlah praktik terbaik:

- **Pelatihan sebelum keberangkatan** mendorong penyuluhan informasi kepada calon TKI dan memperkuat kemampuan mereka untuk melindungi diri. Pendidikan keuangan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang lain memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan TKI dan keluarga mereka;
- **Dukungan terhadap kerjasama pemangku kepentingan** mempromosikan aliansi antara lembaga-lembaga pemerintah, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi pekerja migran dan PRT. Dukungan ini memungkinkan adanya upaya yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mempromosikan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja migran; dan
- **Integrasi persoalan-persoalan terbaru** seperti HIV dan AIDS dan gender dalam upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan terbukti efektif dalam membantu organisasi-organisasi melakukan internalisasi persoalan-persoalan penting ini dan memasukkannya ke dalam upaya penyusunan program mereka sendiri.

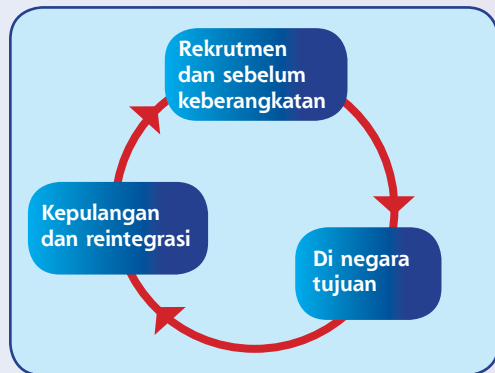
Capaian pentings 2 & 3

Bantuan langsung dan penyediaan layanan bagi pekerja migran selama siklus migrasi, yang disediakan ILO bekerja sama dengan para mitra nasional dan daerah

- Memperkuat penyuluhan informasi tentang registrasi dan peluang kerja di luar negeri.
- Pelatihan sebelum keberangkatan bagi calon TKI tentang migrasi yang aman dan kesehatan TKI (misalnya tentang HIV dan AIDS) untuk memperkuat kemampuan mereka dalam melindungi diri sendiri.
- Peningkatan kesadaran dan layanan penyuluhan bagi calon PRT dan keluarga mereka serta masyarakat pada umumnya

Mata pencaharian, reintegrasi dan layanan pemberdayaan ekonomi melalui

- Pelatihan pendidikan keuangan;
- Pelatihan tentang pengembangan kewirausahaan (SIYB);
- Pelatihan keterampilan produksi;
- Pelatihan koperasi; dan
- Penyediaan layanan keuangan mikro termasuk asuransi



- Peningkatan kapasitas para mitra untuk menyediakan akses ke layanan hukum dan perlindungan seperti help desks, hotlines dan layanan psikologis.
- Layanan remitan untuk TKI terkait transfer dan promosi pemakaian remitan secara produktif.
- Peningkatan kesadaran berbasis media dan berbasis masyarakat dan penyuluhan kepada TKI di negara-negara tujuan.

Potret kehidupan PRT migran

Untuk mendokumentasikan kehidupan dan pengalaman perjalanan migrasi pekerja migran, ILO bekerja sama dengan Sim Chi Yin, seorang wartawan foto Singapura, menerbitkan sebuah esai foto berjudul "Jalan Pulang yang Panjang: Perjalanan Pekerja Migran Indonesia".



Esai foto ini merupakan potret kehidupan pribadi pekerja migran, yang terdiri dari sekitar 80 foto yang menggambarkan perjalanan yang dilalui pekerja migran selama siklus migrasi mereka – mulai dari tahap sebelum keberangkatan, keberangkatan hingga penempatan, dan kepulangan. Foto-foto tersebut dilengkapi dengan kisah langsung dari pekerja migran perempuan dan keluarga mereka yang menguraikan tentang kehidupan mereka sehari-hari, saat-saat pribadi, keputusan sulit dalam melakukan migrasi dan perjuangan mereka dalam menghadapi masalah dan kesulitan finansial sehari-hari.

Esai foto ini disusun ILO melalui proyek "Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran". Didanai Pemerintah Norwegia, Proyek ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran dari praktik perdagangan dan kerja paksa serta memberdayakan mereka secara finansial untuk menyediakan alternatif dari kondisi kerja di luar negeri dan praktik migrasi yang berbahaya. ❁



Capaian penting 4:

Penelitian, dokumentasi dan publikasi

Untuk mengatasi kompleksitas migrasi kerja, ILO telah mengadakan penelitian, analisis kebijakan dan penilaian, serta mengumpulkan dan melakukan penyuluhan informasi, yang terkait dengan, kondisi kerja bagi TKI. Kesenjangan pengetahuan telah dapat diatasi dan informasi disebarluaskan bersama mitra utama dan organisasi mitra. Di samping itu, ILO telah mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengumpulkan data, melakukan dokumentasi, menyusun pelaporan dan menyebarkan informasi yang terkait dengan kondisi pekerja migran.

Publikasi dengan bantuan ILO: “Dreamseekers: Indonesian Women as Domestic Workers in Asia” oleh Dewi Anggraeni

ILO mendukung wartawan senior Dewi Anggraeni dalam merekam kehidupan PRT asal Indonesia. Dewi adalah koresponden Australia untuk majalah Tempo dan kontributor tetap surat kabar Jakarta Post. Buku ini tidak saja berisi perspektif PRT di Singapura, Hongkong dan Malaysia, tapi juga perspektif para majikan dan agen penyalur, untuk memberi gambaran lengkap dan realistis tentang persoalan ini. Buku ini mengungkap dunia PRT yang tersembunyi, menguraikan kisah langsung dari PRT tentang perjuangan dan keberhasilan mereka. Buku ini diluncurkan pada tanggal 6 April 2006 bekerja sama dengan Equinox Publishing. Buku ini tersedia secara online dan di toko-toko buku di Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Amerika Serikat. ❁



© ILO Jakarta

Alan Boulton, mantan Direktur ILO di Indonesia, secara simbolis menandatangani halaman sampul “the Dreamseekers” untuk menandai peluncuran buku tersebut





3

Migrasi pekerja internasional dan HIV dan AIDS

Beberapa faktor sosial budaya, ekonomi dan politik di negara asal dan negara tujuan mempengaruhi risiko penularan HIV dan IDS di kalangan pekerja migran internasional. Faktor-faktor ini mencakup terpisah dari pasangan, keluarga serta norma sosial budaya, hambatan bahasa, kemiskinan, kondisi hidup di bawah standar, dan kondisi kerja yang eksploitatif, termasuk kekerasan seksual. **Isolasi dan tekanan yang ada dapat membuat pekerja migran memiliki perilaku, seperti hubungan seks komersial dan kasual yang tidak aman, sehingga memperbesar risiko terjangkit HIV dan AIDS.** Risiko ini diperparah oleh akses yang tidak memadai kepada informasi dan layanan pencegahan HIV dan AIDS, serta rasa takut terstigmatisasi bila meminta informasi atau layanan mengenai hal ini.

Pekerja migran perempuan mungkin ditempatkan dalam situasi yang membuat mereka sangat rentan terhadap HIV dan AIDS. Banyak jenis pekerjaan yang relatif non-terampil di sektor manufaktur, layanan domestik atau hiburan, yang biasanya tidak memiliki status hukum dan akses ke layanan kesehatan dan layanan terkait HIV dan AIDS terbilang minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini, mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan/atau kekerasan fisik dan seksual, dalam beberapa kasus dilakukan oleh majikan mereka, dan mereka pun berpeluang kecil untuk memperoleh pekerjaan lain.

Tidak ada data yang komprehensif tentang HIV dan AIDS di kalangan TKI, namun sejumlah penelitian di tingkat negara menunjukkan bahwa prevalensi HIV dan AIDS di kalangan pekerja migran laki-laki dan perempuan serta mitra mereka mencapai empat kali lebih besar dibandingkan mereka yang bukan TKI.

ILO bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan terkait memperkuat perlindungan bagi TKI terhadap HIV dan AIDS. **Sebagai bagian dari respons nasional secara keseluruhan terhadap epidemik HIV dan AIDS yang dihadapi Indonesia, kegiatan ILO difokuskan terutama pada upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pekerja migran tentang, kepekaan terhadap dan perlindungan dari HIV dan AIDS.**

Dengan mempromosikan pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas kegiatan, dan mengembangkan sarana informasi, ILO berupaya mengatasi kerentanan pekerja migran dan mengadvokasi migrasi yang aman serta akses kesehatan yang lebih baik bagi pekerja migran.



Kisah Normawati – Ketua Pendamping dan Pengembangan TKI

Perlakuan tak manusiawi terhadap para TKI membuat hati Normawati miris. Ia tergerak menjadi aktivis pendamping pekerja migran. Setelah sekian lama berkecimpung menangani dan mendampingi para TKI bermasalah, Norma mengaku baru secara intensif belajar dan banyak memperoleh masukan informasi seputar HIV dan AIDS pada 2002, saat mengikuti pelatihan yang digelar ILO. Sebelumnya ia tidak merasa perlu atau berkewajiban menjelaskan masalah HIV kepada para TKI yang didampinginya. Barulah setelah menerima banyak pelatihan tentang HIV dan AIDS, ia menyadari pentingnya pengetahuan HIV dan AIDS bagi para TKI dan calon TKI dampungannya.

Dengan berbekal pengetahuan yang didapatkan dari beberapa kali pelatihan, Norma memutuskan untuk “menularkan” sebanyak mungkin pengetahuan dan pemahamannya soal HIV dan AIDS kepada para calon TKI beserta keluarganya. Setidaknya setiap dua bulan sekali dia datang ke “kantong-kantong” TKI, seperti di beberapa wilayah seputaran Jakarta, Cianjur, dan Sukabumi. Agar penyuluhan dan pemberian materi HIV dan AIDS efektif, Norma memberikan materi sederhana yang dituturkan dalam bahasa dan cara yang juga sederhana. Tujuannya agar mudah dipahami. Tak jarang ia juga meminta bantuan aparat desa setempat untuk mengumpulkan warga saat penyuluhan.

“Setelah itu saya menyadari bahwa anak perempuan ini (pekerja migran) perlu mengetahui tentang hal ini. Tujuan mereka pergi ke luar negeri adalah memperoleh uang, dan bukan penyakit. Kami mempersiapkan mereka agar tidak pulang membawa penyakit. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati,” kata Norma. ❁

© ILO Jakarta



Peringatan Hari Migran Internasional, menyoroti hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja.

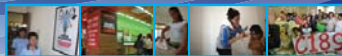


© ILO Jakarta



© ILO Jakarta

Serangkaian kegiatan konsultasi dan peningkatan kesadaran mengenai pengakuan PRT, termasuk PRT migran, sebagai pekerja.



4

Apa langkah selanjutnya?

Kantor ILO untuk Indonesia telah bekerja sama secara erat dengan konstituen tripartitnya, yaitu pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha – serta para mitra lain – untuk melindungi dan mempromosikan HAM dan hak-hak mendasar pekerja migran, termasuk PRT di tempat kerja mereka.

Kegiatan ILO Jakarta terkait migrasi kerja menawarkan kontribusi besar bagi hasil pekerjaan layak ILO di Indonesia. Salah satu pilar Program Pekerjaan Layak Nasional ILO untuk Indonesia adalah “Meningkatkan pengelolaan migrasi kerja demi perlindungan yang lebih baik bagi TKI”. Upaya ILO Jakarta terkait migrasi kerja merupakan hal penting dalam pilar ini dan dilakukan melalui pengembangan kerangka hukum dan kebijakan, penyuluhan dan pemberdayaan serta melalui intervensi-intervensi yang ditargetkan untuk menanggapi masalah kerja paksa dan perdagangan.

10 tahun lalu peraturan ketenagakerjaan Indonesia tidak mencakup pekerja migran, namun saat ini pengembangan kebijakan telah mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran. Di samping itu, masalah PRT dan pekerja migran tetap menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Indonesia 2010-2014 serta Rencana Strategis Kemenakertrans 2010-2014, yang bertujuan memperkuat kerangka kebijakan tentang penempatan dan perlindungan TKI, termasuk dengan mengamandemen UU No. 39 Tahun 2004.

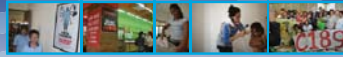
Komitmen ILO sangat penting dalam mendesak Pemerintah Indonesia untuk memasukkan kebijakan dan rencana dukungan bagi pekerja migran dalam agendanya, serta mendukung *Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak* untuk PRT,

yang diadopsi saat sidang ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2011, dan untuk meratifikasi *Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka* pada bulan Mei 2012.

Indonesia telah memprakarsai dialog-dialog bilateral bersama pekerja migran di negara-negara tujuan, seperti Malaysia dan Arab Saudi, tentang kondisi kerja dan perlindungan bagi TKI dengan tujuan membuat kesepakatan dengan semua negara tujuan yang utama tentang kondisi pekerja migran. Ratifikasi konvensi-konvensi internasional akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral atau multilateral dengan negara-negara tujuan dan, akhirnya, memberi manfaat bagi TKI dalam berbagai hal.

Kegiatan ILO terkait migrasi pekerja telah dilaksanakan saat bertukar pikiran terkait kebutuhan untuk melindungi pekerja migran. Kendati tantangan memang masih ada, dan beragam perbaikan masih perlu dilakukan, namun Indonesia telah melakukan beragam upaya untuk memperkuat perlindungan pekerja migrant dalam konteks regional. Sentimen ini tercermin dalam Proyek ILO ASEAN TRIANGLE, sebuah proyek regional tentang migrasi pekerja yang didukung oleh CIDA Kanada, yang menyediakan perspektif regional tentang negara asal dan tujuan serta difokuskan pada pekerja migran di sektor dan industri lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerjasama terkait masalah pekerja migran di kalangan negara-negara ASEAN, dengan melibatkan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan harmonisasi antara peraturan tentang rekrutmen dan penempatan dan kondisi kerja pekerja migran. Proyek ini akan mempromosikan pendekatan multilateral dan regional terkait persoalan-persoalan umum, membuat regionalisme agar lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas lembaga ASEAN.

Walaupun kemajuan telah dicapai dalam hal perlindungan pekerja migran, namun tantangan besar masih tetap ada dan tindakan lebih lanjut perlu dilakukan. Penduduk Indonesia semakin meningkat, demikian pula hanya dengan migrasi kerja dari Indonesia karena permintaan akan pekerja berketerampilan rendah disesuaikan dengan kondisi dari negara asal, difasilitasi oleh hubungan antara rantai migrasi dan perjanjian bilateral antar pemerintah. Karenanya, perlindungan TKI tetap merupakan tindakan yang penting di masa mendatang. Memperbaiki peraturan tentang upah, kondisi kerja dan perlindungan di bidang pekerjaan domestik merupakan hal penting dalam menyikapi jumlah pekerja perempuan yang semakin meningkat. Tindakan lain untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran selama siklus migrasi secara keseluruhan perlu dirumuskan dan dilaksanakan



oleh pemerintah bersama dengan para mitra sosial. Kita juga perlu memfokuskan perhatian pada upaya menciptakan peluang kerja di Indonesia melalui program-program pemberdayaan ekonomi lokal bagi pekerja migran dan keluarga mereka.

ILO akan terus membantu Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Untuk memastikan hasil yang berkelanjutan dan efektif, kita perlu meniru praktik terbaik dan mempertahankan kerjasama yang baik antar semua aktor terkait. Kita juga perlu menarik perhatian masyarakat tentang nasib pekerja migran. Hanya melalui upaya bersama oleh semua pihak –pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha serta ILO – kita dapat memperkuat dan menjamin perlindungan bagi TKI.

Bersama Bisa
Together it's possible

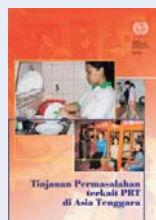
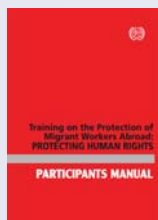
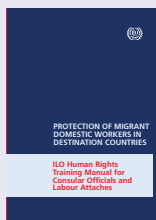
Lampiran

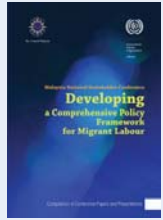
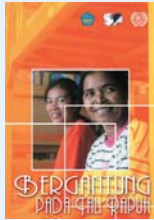
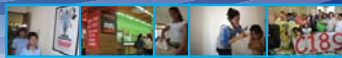
PUBLIKASI PENTING TENTANG MIGRASI PEKERJA DI INDONESIA

BUKU

Publikasi berikut ini tersedia di Kantor ILO Jakarta dan pada situs <http://www.ilo.org/jakarta/>

1. ILO. 2006. Pelatihan ILO dan DEPLU tentang perlindungan TKI di luar negeri: melindungi HAM – buku panduan untuk peserta. ILO, Jakarta.
2. ILO. 2006. Perlindungan TKW di negara-negara tujuan: buku manual pelatihan ILO tentang HAM untuk pegawai konsulat dan atase perburuhan. ILO, Jakarta.
3. ILO. 2006. Kajian tentang Masalah Penting yang terkait dengan PRT di Asia Tenggara. ILO, Jakarta.
4. ILO 2006. Menggunakan UU Indonesia untuk melindungi dan memberdayakan TKI: beberapa pelajaran dari Filipina. ILO, Jakarta.
5. ILO 2006. Hak-hak Pekerja Migran: Buku Panduan untuk Serikat Pekerja di Indonesia. ILO, Jakarta.
6. ILO. 2006. PRT di Asia Tenggara, Prioritas Pekerjaan Layak. ILO, Jakarta.
7. Asian Migrant Centre et al. 2007. *Underpayment 2. The Continuing Systematic Extortion of Indonesian Migran Workers in Hong Kong: An In-Depth Study*. Supported by ILO-Indonesia dan OXFAM-HK.
8. ILO. 2007. Bergantung pada Tali Rapuh. ILO, Jakarta.
9. ILO. 2007. Hak-hak Pekerja Migran: buku panduan. ILO, Jakarta.
10. ILO. 2008. Mengembangkan kerangka kebijakan tetang pekerja migran: kompilasi dokumen dan presentasi konferensi. ILO, Jakarta.
11. ILO. 2011. Kisah perjuangan hidup: kisah PRT melalui ucapan mereka sendiri. ILO, Jakarta.





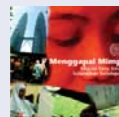
BUKLET



BROSUR



VIDEO



- ♦ PRT: Bagian 1 - Mitos
- ♦ PRT: Bagian 2 - Gaji
- ♦ PRT: Bagian 3 - Lembur
- ♦ PRT: Bagian 4 - Lingkungan kerja
- ♦ PRT: Bagian 5 - Kesehatan
- ♦ PRT: Bagian 6 - Kontrak kerja

POSTER



Donor



Pemerintah Norwegia

Department for
International
Development
(UK-DFID)Canadian International
Development Agency
(CIDA)